

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia; 2) untuk menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perjudian *online* adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 Ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya diatur pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Terjadinya problematika kekaburan norma bahwa Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memperhatikan adanya asas hukum *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi; 2) Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia bahwa ketidakmampuan negara yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian *online*. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal di luar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu *restorative justice*, dan *diversi*. Upaya tersebut merupakan wujud perlindungan hukum represif, untuk upaya perlindungan hukum secara preventif berupa peran aktif dari orang tua, lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Perjudian Online.*

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF ONLINE GAMBLING CRIMES IN THE PERSPECTIVE OF THE OBJECTIVES OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to 1) analyze the regulation of legal protection for children as perpetrators of online gambling crimes in Indonesia; 2) to analyze future criminal law policies regarding legal protection for children as perpetrators of online gambling crimes from the perspective of the objectives of criminal law in Indonesia. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the legislative approach and conceptual approach and case approach. The analysis of legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study indicate that 1) The regulation of legal protection for children as perpetrators of online gambling crimes in Indonesia that the form of legal protection for children as perpetrators of online gambling is based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, specifically in Article 27 Paragraph (2) and for the regulation of criminal acts it is regulated in Article 45 Paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions. The occurrence of the problem of norm ambiguity that Article 27 Paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law does not pay attention to the legal principle of Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta) which means that lawmakers must define clearly without ambiguity so that there is no ambiguous formulation regarding prohibited and sanctioned acts; 2) Future criminal law policy regarding legal protection for children as perpetrators of online gambling crimes in the perspective of the objectives of criminal law in Indonesia that the inability of the state which should provide legal protection for children who commit online gambling crimes. Law on the Child Criminal Justice System Number 11 of 2012, the efforts of judges in handling cases of naughty children outside the courts are emphasized in two ways, namely restorative justice, and diversion. These efforts are a form of repressive legal protection, for preventive legal protection efforts in the form of an active role from parents, state institutions such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Ministry of Communication and Digital (Komdigi).

Keywords: Legal Protection, Children as Perpetrators of Criminal Acts, Online Gambling.